

Evaluasi Pengumpulan Data Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) di Kota Bandung Menggunakan Analisis Fishbone

Devita Arrobbani¹, Rike Anggun Artisa²

Politeknik STIA LAN Bandung

Email : 20110187@poltek.stialanbandung.ac.id¹, rikeanggunartisa@poltek.stialanbandung.ac.id²

Abstrak

Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung tepatnya oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mengalami kendala pada tahap awal yaitu pada tahap pemetaan yang mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan data dari beberapa kelurahan. Berdasarkan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, pengumpulan data kuisisioner KTB merupakan langkah dalam mengurangi risiko bencana berbasis kapasitas masyarakat dan wilayah. Melihat bahwa apabila dalam pengumpulan data kuisisioner KTB yang terlambat, akan memperlambat pemetaan wilayah untuk siap dalam menghadapi bencana di tingkat kelurahan. Bila di tingkat kelurahan tidak ada data pemetaan wilayah yang siap menghadapi bencana, pemerintah kota akan kesulitan melakukan pengambilan keputusan/kebijakan apabila terjadi bencana di tingkat kewilayahan. Terlambatnya pengumpulan data kuisisioner KTB di analisis menggunakan Fishbone Diagram dan menghasilkan 4 indikator penyebab masalah diantaranya, 1) metode, 2) sumberdaya, 3) pengukuran dan 4) pihak eksternal (kelurahan). Terlambatnya pengumpulan data kuisisioner Kelurahan Tangguh Bencana dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Strategi yang dilakukan dapat dijelaskan dengan mengadakan sosialisasi lanjutan, pembentukan tim fasilitator KTB dan pembuatan skema alur pengisian data kuisisioner KTB yang dikirimkan kepada kelurahan.

Kata Kunci: pengumpulan data, kelurahan tangguh bencana (KTB), analisis fishbone.

Evaluation of Disaster Resilient Village (KTB) Data Collection in Bandung City Using Fishbone Analysis

Abstract

The Disaster Resilient Village (KTB) activities carried out by the Bandung City Government, precisely by the Bandung City Fire and Disaster Management Service, experienced obstacles in the early stages, namely at the mapping stage which experienced delays in collecting data from several villages. Based on BNPB Regulation No. 1 of 2012, the collection of KTB questionnaire data is a step in reducing disaster risk based on community and regional capacity. Seeing that if the KTB questionnaire data collection is late, it will slow down the mapping of the area to be ready to face disasters at the village level. If there is no regional mapping data at the village level that is ready to face disasters, the city government will find it difficult to make decisions/policies in the event of a disaster at the regional level. The delay in collecting KTB questionnaire data in the analysis uses a Fishbone Diagram and produces 4 indicators of the cause of the problem, including, 1) method, 2) resources, 3) measurement and 4) external parties (sub-districts). The delay in collecting questionnaire data for Tangguh Disaster Village was analyzed using qualitative methods with data collection, namely interviews, observations and documentation studies. The strategy carried out can be explained by holding further socialization, the formation of a KTB facilitator team and the creation of a flow scheme for filling out KTB questionnaire data sent to the village.

Keywords: data collection, disaster resilient villages (KTB), fishbone analysis.

A. PENDAHULUAN

Kota Bandung merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat rawan bencana yang cukup tinggi. Kota Bandung sendiri berada di bagian tengah Cekungan Bandung yang menyebabkan Kota Bandung menjadi kota dengan potensi banjir yang cukup tinggi (Taufik et al. 2021). Titik tertinggi Kota Bandung tepatnya di daerah Kecaamatan Cidadap memiliki kerentanan terhadap longsor karena berada di ketinggian 1.050 mdpl. Selain itu, Kota Bandung di kelilingi sesar aktif yaitu sesar lembang, sesar cimandiri dan zona subduksi yang menyebabkan Kota Bandung rawan terhadap gempa bumi.

Dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, Kota Bandung memiliki potensi gempa bumi karena dilewati oleh sesar-sesar aktif yang berada di 3 daerah sumber gempa yang saling melingkup yaitu 1) sumber gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung, 2) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, dan 3) sumber gempa bumi Garut- Tasikmalaya-Ciamis. Potensi bencana di Kota Bandung sendiri tercantum dalam Perda Kota Bandung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung diantaranya adalah a) banjir, b) gunung berapi, c) gempa bumi, d) longsor, e) cuaca ekstrem, dan f) pergerakan tanah. (V.A.R.Barao et al. 2022).

Tabel 1 Data Daerah Rawan Bencana Kota Bandung

No	Jenis Bencana Kota Bandung	Daerah Rawan
1	Banjir	Andir, Antapani, Arcamanik, Astana Anyar, Babakan Ciparay, Bandung Kidul, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Buah Batu, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Cibiru, Cidadap, Cinambo dan Gedebage.

No	Jenis Bencana Kota Bandung	Daerah Rawan
2	Gempa Bumi	Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblont, Kiaracandong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung.
3	Longsor	Coblont, Cidadap, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler, Cibiru, Ujungberung dan Mandalajati.
4	Cuaca Ekstrem	Menengah : Cidadap, Coblont, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Mandalajati, Ujungberung, Cibiru, Arcamanik, Gedebage.
5	Kebakaran Pemukiman Padat Penduduk	Babakan Ciparay, Cicendo, Astana Anyar, Bandung Kidul, Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, dan Cibiru.
6	Gunung Berapi	Sukasari, Sukajadi, Cidadap, Coblont dan Cibeunying Kaler.

Sumber : RPJMD 2018-2023 & BPBD Jawa Barat

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dari tabel diatas menjelaskan tingkat risiko bencana yang ada di Kota Bandung cukup menjadi permasalahan yang harus dicegah. Tingkat risiko bencana dipengaruhi oleh 3 indikator, a) ancaman, b) kerentanan dan c) kapasitas di wilayah (Skripsi and Rusfiana n.d.). Bencana sendiri akan menimbulkan dampak apabila ancaman nya terdapat pada tingkat yang tinggi, kerentanan terlalu besar sementara kapasitas daerah hingga masyarakat nya tidak cukup baik untuk mengatasi risiko bencana tersebut.

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung berupaya menjalankan Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Kota Bandung untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi (Romadhan et al. 2022). Kelurahan sebagai tingkatan terbawah pada hierarki pemerintahan kota yang langsung menjangkau masyarakat, dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan kebijakan dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kapasitas wilayah.

Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana menjadi alternatif dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kapasitas wilayah. Pembentukan Program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) ini didasarkan pada Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Tujuan dari KTB ialah menilai kesiapan dari masyarakat tingkat kelurahan dalam menghadapi bencana. Penilaian ini dimaksudkan untuk meninjau kelurahan mana saja yang paling siap dalam menghadapi bencana, sehingga apabila terjadi bencana di kemudian hari kelurahan yang memiliki penilaian dalam KTB yang masih rendah, kelurahan ini akan menjadi prioritas bantuan dari Pemerintah. Penilaian KTB pula dapat menjadi nilai kemandirian masyarakat di tingkat kelurahan, serta dapat menjadi salah satu faktor pengurangan risiko bencana karna sarana prasarana yang

telah di akumulasikan dalam KTB telah terinventarisir.

Pada Kota Bandung sendiri pelaksanaan KTB baru dalam tahap penilaian wilayah Kelurahan Tangguh Bencana. Penilaian Kelurahan Tangguh Bencana masuk ke dalam RPJMN 2015-2019 dengan sasaran 5000 desa/kelurahan di seluruh Indonesia (Bappenas 2015). Penilaian Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Bandung, dikembangkan untuk mengurangi risiko bencana pada 151 kelurahan berbasis masyarakat dan komunitas dimana pemeran utamanya adalah masyarakat. Proses penilaian Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) di Kota Bandung di akomodasi menggunakan Data Kuisisioner.

Data kuisisioner KTB memuat variabel-variabel untuk mengukur ketahanan wilayah sebagai upaya pengurangan risiko bencana dengan kapasitas wilayah dan masyarakat kelurahan. Dalam pelaksanaannya, terdapat keterlambatan dalam proses pengumpulan data kuisisioner KTB dari beberapa kelurahan. Data pengisian kuisisioner KTB ini sangat penting untuk melihat tingkat kesiapsiagaan kelurahan dalam kriteria yaitu Utama, Madya dan Pratama untuk menghadapi bencana di masa tidak dapat di prediksi sehingga membutuhkan analisis dalam pemecahan masalahnya. Salah satu metode analisis dan pemecahan masalah adalah analisis *fishbone*.

Analisis *fishbone* ialah metode yang efektif untuk menganalisis data yang ada guna mengidentifikasi masalah dengan mengkaji penyebab-penyebabnya untuk mengungkap berbagai sumber yang beragam. *Fishbone*, atau yang dikenal sebagai diagram "*ishikawa*," sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana berbagai faktor dapat berperan terhadap pencapaian tujuan, serta membantu mengelompokkan faktor-faktor tersebut ke dalam kategori yang luas (Istikomah, Basori, and Budiyanto 2017) .

Penelitian ini melakukan analisis menggunakan analisis *fishbone* dengan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

tujuan untuk mengatasi masalah keterlambatan pengumpulan data kuesioner KTB oleh beberapa Kelurahan di Kota Bandung kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sebagai pelaksana kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana.

Urgensi Pengumpulan Data Kuesioner KTB di Kota Bandung

Tujuan dari Pengumpulan Data Kuisisioner KTB sendiri ialah menyediakan data yang berisi nilai kesiapan dari masyarakat tingkat kelurahan dalam menghadapi bencana.

Pengumpulan data penilaian ini dimaksudkan untuk :

1. Penyediaan Data Kelurahan Tangguh parameter penyediaan data kelurahan mana saja yang paling siap dalam menghadapi bencana. Terdapat 3 tingkatan, Pratama, Madya dan Utama.
2. Data penentuan kemandirian masyarakat di tingkat kelurahan. Menjadi salah satu faktor pengurangan risiko bencana karna sarana prasarana yang telah di akumulasikan dalam KTB telah terinventarisir.
3. *Evidence Based Policy* Sebagai rujukan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan pemantauan oleh pengelola dan pelaksana KTB di semua tingkatan.

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan hasil penelitian. Objek penelitian adalah pegawai pelaksana KTB Diskar PB Kota Bandung dan pegawai Kelurahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi melalui pengamatan langsung keadaan di pegawai, dan studi dokumentasi. Setelah melakukan pengumpulan data, maka data diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam pengambilan

keputusan, adapun analisis data menggunakan analisa *Fishbone Diagram*.

Fishbone Diagram merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui penyebab dan akibat masalah yang terjadi. Diagram ini menggambarkan hubungan antara masalah dengan semua faktor – faktor penyebab yang mempengaruhi masalah tersebut. Pada dasarnya *Fishbone Diagram* dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti mempermudah proses identifikasi akar penyebab dari suatu masalah, menciptakan usulan untuk solusi suatu masalah, dan menghasilkan pengetahuan dan pemikiran baru.

Menurut (Ramadhani 2023) dalam membuat fishbone diagram, terdapat langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

1. Menentukan masalah yang ada
2. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang terkait dengan masalah.
3. Menemukan kemungkinan penyebab dari setiap faktor.
4. Menganalisis diagram yang telah dibuat.

Dalam analisis masalah keterlambatan pengumpulan data kuesioner KTB, penyebab masalah yang terjadi ialah pada faktor *Man, Methode, Measurable* dan *External*.

C. PEMBAHASAN

Pengumpulan data kelurahan tangguh bencana (KTB) di Kota Bandung sendiri dijalankan dengan pengambilan data secara tersurat melalui pengisian Google Drive ke tiap kelurahan oleh Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Di samping itu, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di tingkat kelurahan pada Penilaian Kelurahan Tangguh Bencana (KTB), Diskar PB Kota Bandung melakukan sosialisasi terlebih dahulu akan urgensi dari program KTB ini kepada masyarakat. Sosialisasi KTB ini dilakukan pada 15 Desember tahun 2021 yang mengundang seluruh pejabat kelurahan yang ada di Kota

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

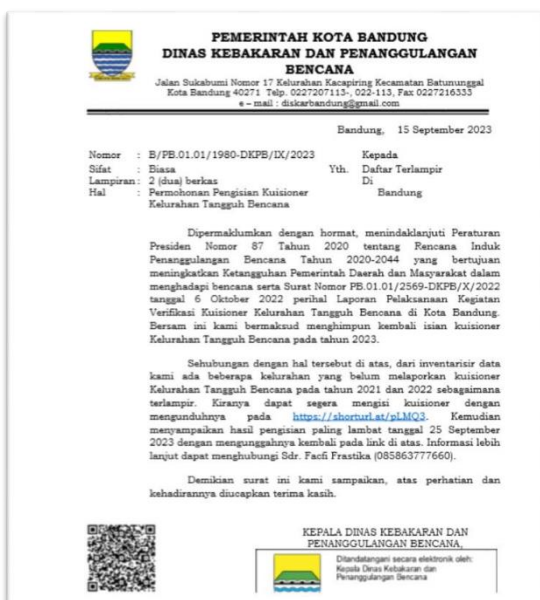
“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Bandung bertempat Aula di Kecamatan Batununggal.

Gambar 1 Surat Edaran Pengisian dan Pengumpulan Kuesioner
Sumber : Diskar PB Kota Bandung

Adapun gambar di atas merupakan surat edaran pengisian dan pengumpulan data kuesioner KTB kepada Kelurahan untuk segera mengumpulkan kuesioner tersebut sebagai bahan pelaporan dari Diskar PB dalam pembuatan IKU Dinas, namun



beberapa Kelurahan sampai melewati batas waktu tersebut belum juga mengirimkan data KTB.

KTB dilakukan mulai dari tahun 2021, hingga di tahun 2023 KTB telah lengkap seluruh Kelurahan yang mengirimkan penilaian Kelurahan Tangguh Bencana. KTB sendiri dilakukan setiap triwulan. Pada tahun 2023, KTB hanya mengumpulkan 61 Kelurahan yang tersisa dari 2 tahun sebelumnya. 61 Kelurahan yang tersisa ini dibagi menjadi 4 triwulan. Triwulan 1 terdapat 15, triwulan 2 terdapat 15, triwulan 3 terdapat 15 dan triwulan 4 terdapat 16 Kelurahan.

Pada saat mulai masuk pada triwulan ke IV 2023 tepatnya 30 Desember, sebanyak 31

kelurahan belum juga mengirimkan kuisisioner KTB sedangkan batas pengumpulan di tanggal 25 September 2023 sesuai dengan surat edaran yang dikirimkan kepada Kelurahan.

Tabel 2.

Daftar Kelurahan yang Belum Mengirimkan Data Kuesioner KTB 2023

No.	Kecamatan	No.	Kelurahan
1	Andir	1	Garuda
2	Babakan Ciparay	2	Margahayu Utara
3	Bandung Kulon	3	Cigondewah Kidul
4		Warung Muncang	
4	Astanaanyar	5	Karasak
6		Pelindung Hewan	
5	Bojongloa Kaler	7	Jamika
6	Bojongloa Kidul	8	Cibaduyut Wetan
9		Dago	
7	Coblong	10	Sadang Serang
8		Hegarmanah	
8	Cidadap	11	Hegarmanah
9	Cibeunying Kaler	12	Cihaurgeulis
13		Sukaluyu	
14		Cikawao	
10	Lengkong	15	Lingkar Selatan
16		Malabar	
17		Turangga	
18		Ancol	
11	Regol	19	Ciateul
20		Cisureuh	
21		Pasirluyu	
22		Kebon Kangkung	
12	Kiaracondong	23	Cipamokolan
13	Rancasari	24	Mekarjaya
14		Ujungberung	
14	Ujungberung	25	Pasirwangi
26		Jatihandap	
27		Karang Pamulang	
28		Pasir Impun	
29		Sindangjaya	
16	Cibiru	30	Cipadung
17	Panyileukan	31	Cipadung Kulon

Sumber : Diskar PB Kota Bandung (Diolah Penulis)

Berdasarkan “Tabel 2” terlihat bahwa 31 Kelurahan yang tersebar di 17 Kecamatan di Kota Bandung belum melakukan pengumpulan data kuisisioner KTB sampai batas yang ditentukan yaitu 25 September 2023. Keterlambatan ini mengakibatkan proses pengumpulan data untuk pelaporan tahunan menjadi sedikit terhambat karena beberapa data kelurahan yang kurang.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Adapun penyebab masalah keterlambatan pengumpulan data kuisisioner KTB ini di analisis menggunakan *Fishbone Analysis*.

Gambar 2

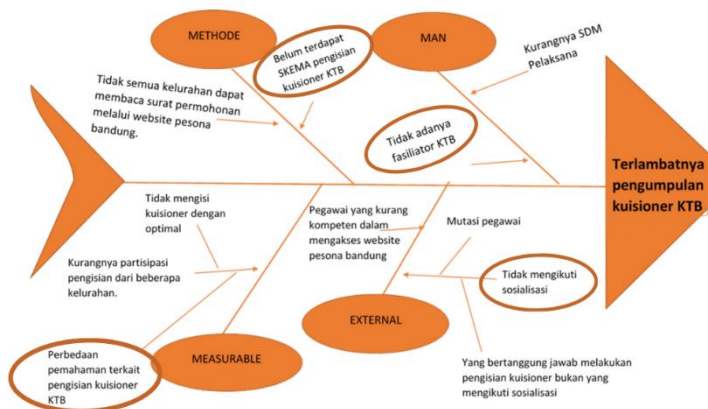


Diagram Analisis Fishbone terkait Keterlambatan Pengumpulan Data Kuesioner KTB tahun 2023

Sumber : Diolah Penulis

Berdasarkan Analisis Fishbone, terdapat permasalahan yang menjadi penyebab terlambatnya pengumpulan data kuisisioner KTB tahun 2023. Mulai dari

1. *Man* atau pegawai/SDM

- Masalah dari yang terdiri dari,
- a. Kurangnya SDM Pelaksana di Diskar PB Kota Bandung yang menjalankan pengumpulan data kuisisioner. Banyaknya kegiatan di luar kantor yang mengharuskan sebagian besar pegawai Bidang PB yang menjadi bidang pelaksana kegiatan KTB ikut serta dalam kegiatan. Kegiatan yang dimaksud antara lain sosialisasi, pembagian rompi dan sertifikat kepada peserta pelatihan yang dimana kegiatan-kegiatan ini seringkali bersamaan dengan waktu pengumpulan kuisisioner KTB, sehingga mengakibatkan bergesernya prioritas dalam penyelenggaraan pengumpulan data KTB yang menjadi IKU dari Sub Urusan Bencana Bidang PB sendiri.
 - b. Tidak adanya fasilitator khusus dalam menjalankan KTB.

Fasilitator KTB sendiri diperuntukan untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam memahami konsep dari Kelurahan Tangguh Bencana ini. Adanya fasilitator dalam KTB ini tertuang dalam Panduan Teknis Fasilitator KTB yang dibuat oleh BNPB Pusat tahun 2016. Namun pada kenyataannya, di Kota Bandung belum terdapat fasilitator KTB dikarenakan jumlah SDM Diskar PB yang melakukan kegiatan KTB sangat sedikit dan memiliki tupoksi masing-masing sehingga tidak terfokus pada KTB saja.

2. *Method* atau Metode

- a. Tidak adanya skema atau alur pengisian data kuisisioner sehingga mengakibatkan ketidaktahuan kelurahan dalam mengisi data, hal tersebut membuat proses pengumpulan data menjadi terhambat.
- b. Pengiriman surat melalui website pesona bandung yang belum semua Kelurahan mengetahui cara penggunaan website ini.

3. *Measurable*

Kurangnya partisipasi kelurahan dalam melakukan pengisian. Berdasarkan “Tabel 2” telah terlihat bahwa terdapat 31 Kelurahan yang belum melakukan pengisian data kuisisioner KTB. selain itu, hal lain dari kurangnya partisipasi adalah perbedaan pemahaman kelurahan dalam menanggapi kegiatan pengumpulan data kuisisioner KTB di Kota Bandung ini. Hal yang dimaksud dengan adanya perbedaan pemahaman sendiri ialah, seringkali disebut sebagai program yang harus dijalankan oleh kelurahan dalam melengkapi sarana prasarana sesuai dengan yang terdapat di dalam kuisisioner KTB ini sehingga pihak kelurahan belum juga mengirimkan kembali kuisisioner KTB kepada Diskar

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

PB Kota Bandung, padahal kondisi *real* nya adalah KTB yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung melalui Diskar PB Kota Bandung baru sampai mencapai tahap awal yaitu pemetaan wilayah yang dilakukan dengan mengirimkan kuesioner untuk mengetahui potensi, ancaman dan peluang apabila terjadi bencana yang dimulai dari tingkat kelurahan.

4. *External*

Pegawai kelurahan tidak mengikuti sosialisasi yang diadakan. Sosialisasi dilaksanakan pada tahun 2021 secara serentak, beberapa kelurahan tidak menghadiri kegiatan sosialisasi sehingga tidak mengetahui teknis dalam pengisian dan pengumpulan data KTB. Selain itu, pegawai kelurahan yang melakukan sosialisasi KTB seringkali telah dimutasi ke daerah lain atau bahkan pegawai kelurahan yang melakukan pengisian kuesioner KTB adalah yang tidak mengikuti sosialisasi.

Dari penjelasan yang dijabarkan menggunakan analisis fishbone, terlihat ada 4 permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul diantaranya berasal dari Man atau SDM, dari Metode atau Metode pengisian KTB itu sendiri, Measurable atau pengukuran KTB dan Pihak eksternal yaitu Kelurahan.

Usulan solusi dari pemecahan masalah yang dilakukan menggunakan analisis fishbone dalam hal keterlambatan pengumpulan data Kuesioner KTB ialah :

- a. Man
Adanya pembentukan Tim Fasilitator KTB ini sesuai dengan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Kelurahan/Desa Tangguh Bencana. Adanya Tim Fasilitator KTB ini sangat dibutuhkan untuk pengefektifan pengumpulan data Kelurahan Tangguh Bencana sebagai langkah awal pemetaan kapasitas wilayah.
- b. Metode

Perlu adanya pembuatan Skema Alur Pengisian dan Pengumpulan Data KTB. Pengumpulan data yang terlambat diakibatkan tidak adanya skema alur pengisian dan pengumpulan, sehingga perlu adanya pembuatan skema agar pengisian dan pengumpulan sesuai prosedur yang dikirimkan kepada pihak kelurahan melalui surat edaran pengisian dan pengumpulan data kuesioner KTB.

c. Measurable

Perlu dilakukan sosialisasi lanjutan dari KTB yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Diskar PB Kota Bandung sebagai pengampu kegiatan kebencanaan di Kota Bandung. Sosialisasi yang dilaksanakan tahun 2021 perlu untuk di upgrade kembali informasi-informasi terkait KTB pada kelurahan.

d. External

Melakukan pendataan peserta yang turut serta dalam kegiatan sosialisasi KTB, perlu adanya ketegasan dalam pemberian informasi dalam kegiatan sosialisasi diperlukan atas dan pegawai secara bersamaan, kelurahan bukan hanya mendelegasikan pegawai yang tidak bertugas dalam mengurus berkas KTB, namun juga pegawai yang bersinggungan langsung dengan kegiatan KTB dan atasan yang strategis dalam memberikan informasi kepada pegawainya apabila terjadi mutasi pegawai pada kelurahan tersebut.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil telaahan di atas, dapat dikatakan bahwa Pengumpulan Data Kuisisioner KTB merupakan suatu yang krusial untuk dilakukan karena berkaitan dengan pemetaan wilayah agar dapat mengurangi risiko bencana berbasis kapasitas wilayah dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat keterlambatan hingga mengakibatkan tidak efektifnya data ketangguhan kelurahan di Kota Bandung

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

sebagai acuan atau Evidence Based Policy. Hasil analisis fishbone yang dilakukan menunjukkan permasalahan keterlambatan pengumpulan data kuesioner KTB terdiri dari Man sebagai SDM yang menjalankan kegiatan, dalam faktor Man masalah yang terjadi adalah kurangnya pegawai atau SDM dari Diskar PB Kota Bandung yang menjalankan kegiatan KTB dalam hal ini Bidang PB yang hanya berjumlah 8 orang dan memiliki tugas masing-masing yang menjadi prioritas selain KTB. Pada faktor metode KTB, tidak adanya alur atau skema pengisian dari Diskar PB Kota Bandung kepada pihak kelurahan sehingga kelurahan kebingungan dan terjadilah keterlambatan. Measurable atau pengukuran KTB dan eksternal KTB yaitu kelurahan, pada faktor ini melihat tingkat pemahaman terhadap KTB oleh kelurahan yang ternyata masih mengaloi kekeliruan. Kemudian untuk faktor terakhir yaitu eksternal ialah pihak kelurahan yang tidak mengikuti sosialisasi serta ketidaksesuaian jobdesk peserta kelurahan yang menghadiri sosialisasi KTB. Solusi dari analisis fishbone yang dilakukan ialah pembentukan tim fasilitator yang khusus terkait KTB oleh Diskar PB Kota Bandung, pembuatan alur atau skema pengisian hingga pengumpulan KTB dalam surat edaran yang iberikan Diskar PB pada kelurahan, perlu dillakukannya sosialisasi lanjutan dari penginformasian terkait KTB oleh Kelurahan dan pendataan peserta sosialisasi serta kewajiban untuk menghadirkan lebih dari 1 pada tiap kelurahan.

REFERENSI

- Anditia, Jane, Dedy Hermawan, and Intan Fitri Meutia. 2021. “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Di Kelurahan Kota Karang.” *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 3(1): 13–25.
- Arifa K, Manurung RK. Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) Di Kelurahan Aur Kecamatan Prof J Komun dan 2022;9(2):355-364.
- Bandung, Pemerintah Kota. 2019. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2018-2023.” JDIH Kota Bandung. <http://bappeda.jabarprov.go.id/documents/raperda-rpjmd-kota-bandung2018-2023/>.
- Budiyanto, S., Nurdin, N., Utomo, T.W.W., Sutrisno, E., Karunia, R.L. (2023). Collaborative Governance Model on The Guidance of Terrorist Parolees (Case Study in Surakarta Parole Office). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8 (2), 214 – 233. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i2.45116>
- Harahap, A.S., Zulvia, P. (2023). Analisis Pengembangan Smart City berdasarkan Dimensi Teknologi, Sumber Daya Manusia, dan Insitutional di Kota Padang Panjang. *Klik: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 4 (1), 618 – 624. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1200>
- Harahap, A., Zulvia, P. (2021). Klasterisasi Desa dengan Menggunakan Algoritma K-Means pada Data Potensi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 237 – 246. <http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3724>
- Harahap, N., Sutrisno, E., & Asropi, A. (2022). Application of Collaborative Governance to Handle Earthquake Victims in West Nusa Tenggara. *KnE Social Sciences*, 7(9), 488–505. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10961>
- Istikomah, Istikomah, Basori Basori, and Cucuk Budiyanto. 2017. “The Influences of Problem-Based Learning Model with Fishbone Diagram to Students’s Critical Thinking Ability.” *IJIE (Indonesian*

- Journal of Informatics Education* 1(1): 171. doi:10.20961/ijie.v1i2.11432.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2012
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2022
- Pradesa, H. A., Agustina, I., & Wijayati, I. Y. (2023). Pelaksanaan Review Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 330–343. <https://doi.org/10.30651/aks.v7i3.13253>
- Pradesa, H. A., Zulvia, P., & Syawali, A. Z. S. (2022). Policy Advocacy for Strengthening Village Governance in Developing Tourism Destination in Wangunharja Village. *Empowerment Society*, 5(1), 33–40. <https://doi.org/10.30741/eps.v5i1.840>
- Pradesa, H.A., Agustina, I., Taufik, N.I., Mulyadi, D. (2021). Stakeholder Theory Perspective in the risk identification process in village government. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 5(1), 17–27. <https://doi.org/10.30741/adv.v5i1.665>.
- Ramadhani, Talitha Nirmala. 2023. “Analisis Keterlambatan Pengiriman Barang Sampai Ke Konsumen Di Pos Bandar Lampung Menggunakan Metode Fishbone.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(5): 296–303. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8015973>.
- Ratnasari Z, Wildawati W. Sumber-Sumber Pendanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten Lampung Selatan. *Bappenas Work Pap.* 2022;5(3):308-333. doi:10.47266/bwp.v5i3.110
- Romadhan, Ach. Apriyanto, Taufik Rahman, Iradhad Taqwa Sihidi, and Krishno Hadi. 2022. “Implementasi Kelurahan Tangguh Bencana Di Bandungrejosari Kota Malang.” *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4(2): 298–321
- Taufik, N.I., Sulistianti, I., Pradesa, H.A. (2022). Penilaian risiko pada layanan pembayaran pensiun PT Asabri Bandung: Sebuah praktek terbaik untuk penguatan tata kelola perusahaan. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5 (2), 857–867. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1729>
- Taufik, N.I., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120–135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Yogyakarta, Pujiono Centre. 2023. “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA (DESTANA) DI KELURAHAN TAMANAN DAN LIRBOYO KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI Ficky Adi Kurniawan*, Inggit Fandayati.” 02(02): 99–112.
- Zulvia, P., & Harahap, A.S. (2023). Advokasi Digitalisasi Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa Cibodas Lembang Sebagai Desa Digital. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 518–525. doi:<https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2501>